

PENGUATAN PROFESIONALISME ANGGOTA DEWAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Oleh:

Andri Rusmana, R.Taqawty Firdausijah, Iwan Satibi
Proram Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan

ABSTRACT

The main problem in this research is Strengthening the Professionalism of Council Members in the Bandung City Regional People's Representative Council as seen from the legislative, budget and supervision functions that have not run optimally.

The research method used by researchers is descriptive analysis with the type of approach being qualitative. Descriptive analysis is intended as a method that describes a situation that was taking place at the time the research was carried out. Meanwhile, research with a qualitative approach is intended as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.

Implementation of the professionalism of council members in the Bandung City Regional People's Representative Council. In their duties, both in legislative, budget and supervisory functions, members must be neutral from the influence of all groups and political parties and not be discriminatory in providing services to the community. In practice, the members of the council in the Regional People's Representative Council of Bandung City still have many shortcomings in terms of legislative, budget and supervisory functions where the results of their work are not in accordance with the targets that have been set so that it can hinder the smooth service to the community, besides that there is still no soul as a member The council thinks that it follows work habits by having different shapes and patterns and not respecting accuracy. In his work.

Strengthening the professionalism of council members in the Bandung City Regional People's Representative Council can be

seen from the functions of legislation, budgeting and supervision which are built from six characteristics, namely must be experts, able to be independent, responsible for their work, able to show that they are professionals, adhere to professional ethics and maintain good relations with clients (the community) have not been running optimally. This means that empirically it shows that although employee professionalism has been implemented based on the professionalism characteristics of council members and has been determined by the Bandung City Regional People's Representative Council, operationally it has not fully run optimally so that it has implications for organizational goals. . Characteristics of being able to show that he as a professional is doing well. Meanwhile, the characteristics of maintaining good relationships with clients (community) have not contributed well.

Keywords: *Strengthening professionalism*

I. Pendahuluan

Pembentukan DPRD Kota Bandung, pada hakekatnya didasarkan pada prinsip sistem pemerintahan yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka di Kota Bandung juga memerlukan penajaman fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD-nya.

Melalui Undang-Undang yang masih baru ini diharapkan daerah lebih berdaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam koridor melalui peraturan yang berlaku. Kota Bandung pada era reformasi adalah sebagai wakil rakyat atau jelmaan seluruh masyarakat Kota Bandung, wajib memberikan pelayanan publik secara maksimal serta modern kepada masyarakat yang beragam dan dinamis. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, bagi setiap Anggota DPRD tersebut diperlukan profesionalisme yang optimal

Dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tersebut, para wakil rakyat bekerja merumuskan kebijakan daerah atas nama pemilihnya, serta menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam proses ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, pemerintahan dan pembangunan. DPRD Kota Bandung yang terdiri atas para anggota-anggotanya yang mewakili rakyat pemilih, adalah pemegang kedaulatan di bidang legislatif bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung. Dalam kaitan ini, Pemda Kota Bandung sebagai pihak eksekutif di daerah, tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Namun, dalam kenyataan menunjukkan bahwa peran dan fungsi DPRD sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan, belum terlaksana dengan baik dan optimal sesuai harapan publik. Kondisi DPRD Kota Bandung yang demikian, dalam beberapa tahun terakhir bersamaan dengan bergulirnya arus reformasi, maka tuntutan atas pemberdayaan DPRD Kota Bandung dalam sistem pemerintahan daerah semakin meningkat

Optimalisasi fungsi dan tugas Anggota DPRD Kota Bandung mulai dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sangat tergantung pada sejauh mana peran yang dimainkan oleh para Anggota DPRD dalam mengemban amanah rakyat. Optimalisasi peran Anggota DPRD, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pengabdian para Anggota DPRD itu tersebut. Oleh karena tuntutan rakyat yang semakin tinggi dan cerdas tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para Anggota Dewan adalah dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme atau kompetensinya agar tidak hanya piawai dalam berpolitik, namun juga memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, disiplin serta moral yang memadai terkait konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain-lain.

Dalam melaksanakan berbagai aspek fungsinya tersebut, DPRD Kota Bandung masih menunjukkan kecenderungan kurang optimal. Salah satu contoh dalam pembuatan Perda Kota Bandung sebagai produk hukum DPRD yang menyangkut kepentingan publik, dominasi eksekutif masih kuat. Hal tersebut terbukti bahwa sebagian besar rancangan Perda Kota Bandung yang diajukan ke DPRD untuk dibahas, berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Bandung dalam hal inisiatif mengajukan rancangan (menampung dan menuangkan aspirasi masyarakat dalam konsep Rancangan Perda) belum sebanding dengan Raperda yang lahir dari pemerintah Kota Bandung. Dalam hak amandemen yang dimiliki DPRD, penggunaannya juga masih sangat rendah, dan sebagian besar Raperda yang diajukan pihak eksekutif lolos dalam pembahasan serta akhirnya mendapat pengesahan menjadi Perda Kota Bandung.

Terkait dengan fungsi pengawasan atau controlling atas pelaksanaan kebijakan daerah, Perda maupun pelaksanaan APBD, hak-hak DPRD yang mencerminkan fungsi pengawasan contohnya hak untuk mengadakan penyelidikan (hak angket), hak meminta keterangan (hak interpelasi), dan hak mengajukan pernyataan pendapat serta hak mengajukan pertanyaan, juga belum digunakan secara optimal oleh DPRD Kota Bandung. Begitu pula, sorotan kritis terhadap berbagai permasalahan seiring dengan keradaan DPRD sebagai badan legislatif dan pengawas eksekutif, berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang terwujud dalam bentuk aksi turun ke jalan sebagai akibat atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemda Kota Bandung yang ditujukan kepada DPRD Kota Bandung. Permasalahan lain terkait kedudukan DPRD Kota Bandung sebagai wakil rakyat, masyarakat menilai bahwa DPRD masih perlu secara maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya secara optimal.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung di lihat dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan?
2. Bagaimana penguatan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung agar fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berjalan optimal?

II. Kerangka Pemikiran

Seorang pegawai yang profesional hendaknya mampu memikul tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya baik yang berupa tanggungjawab pribadi, sosial, intelektual maupun tanggungjawab moral sehingga dalam lingkungan pekerjaan profesionalisme menjadi tolok ukur dimana pegawai yang profesional akan menciptakan kreativitas baru. Rasyid (2007:17) yang menyatakan bahwa:

Peningkatan kualitas profesionalisme para pegawai merupakan suatu keharusan. Bagaimanapun juga kemampuan pemerintah untuk memberi respons terhadap berbagai perubahan dan tuntutan-tuntutan baru yang terus tumbuh dalam masyarakat hanya mungkin dipelihara, jika para aparaturnya memiliki kualitas profesionalisme yang tinggi

Pendapat tersebut di atas menurut pemikiran peneliti adalah bahwa profesional bagi seseorang merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan untuk memajukan tujuan organisasi lebih efektif dan efisien. Rasyid (2007:103) menyatakan bahwa: “Seseorang pamong praja yang profesional dan responsif tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi, di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya”. Dari pendapat tersebut, jelas bahwa seseorang yang profesional pada dasarnya adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Berkaitan dengan itu, menurut Pamungkas (2014:23) profesionalisme pada dasarnya mengandung tiga unsur yang terkait erat satu dengan yang lainnya, yaitu:

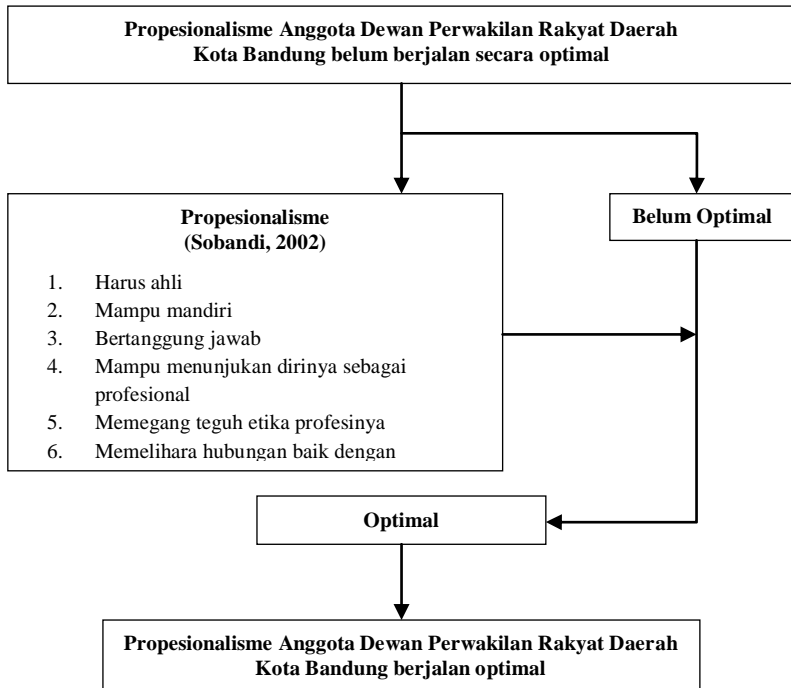
1. Kapasitas atau stok keahlian yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Moral atau etika, dan perilaku atau tindak tanduk, baik secara individu maupun kelompok, dan;
3. Pelayanan terhadap orang, masyarakat atau lingkungan.

Unsur-unsur yang dikemukakan tersebut di atas menurut pemikiran peneliti adalah bahwa kapasitas, moral dan pelayanan merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang birokrat. Maister (2017:23) menyatakan bahwa “Profesionalisme adalah masalah sikap bukan seperangkat kompetensi. Seorang profesional sejati adalah seorang teknisi yang peduli”. Sobandi (2002:64) menegaskan bahwa: “Profesionalisme birokrasi adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi yang dimiliki oleh birokrat dalam melaksanakan pekerjaan”. Lebih jauh Sobandi (2002:64) mengemukakan bahwa ada enam karakteristik dari profesionalisme yaitu:

1. Harus ahli (*expertise*); bahwa pegawai harus menguasai pekerjaan, menguasai tugas dan memahami permasalahan
2. Mampu mandiri (*autonomy*); dimaksudkan pegawai tidak boleh ada ketergantungan, mempunyai pendirian dan mampu berdiri sendiri.
3. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya; dimaksudkan pegawai bersungguh-sungguh dalam bekerja, bekerja dengan penuh kemampuan serta menanggung segala sesuatu.
4. Mampu menunjukkan bahwa dirinya sebagai profesional; pegawai mempunyai disiplin dalam bekerja, mempunyai kemahiran dalam bekerja dan mempunyai kependaian dalam bekerja.
5. Memegang teguh etika profesinya (*ethics*); adanya kejujuran dalam bekerja, dapat mengutamakan kepentingan institusi dan konsisten dalam bekerja.
6. Memelihara hubungan baik dengan pihak lain (masyarakat); pegawai bertanggung jawab terhadap tugas, adanya interaksi dan adanya kerjasama diantara para pegawai.

Profesionalisme pegawai yang terdapat pada suatu organisasi birokrasi dalam menguraikan kerangka kerjanya merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencapai kinerja pegawai sebuah organisasi. Teori Sobandi (2002:64) di atas dipilih

oleh peneliti dan digunakan sebagai alat analisis dengan alasan bahwa teori-teori tersebut alat ukurnya sesuai dengan karakteristik masalah yang terjadi, sehingga teori tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilapangan. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar
Kerangka Berpikir Penelitian

2.1. Proposisi Penelitian

1. Pelaksanaan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan belum berjalan secara optimal.,

2. Terdapat penguatan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dengan mempertimbangkan karakteristik (1) harus ahli, (2) mampu mandiri, (3) bertanggung jawab terhadap pekerjaan, (4) mampu menunjukkan dirinya sebagai profesional, (5) memegang teguh etika profesinya (*ethics*) dan (6) memelihara hubungan baik dengan pihak lain.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan jenis pendekatannya adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:86) bahwa “deskriptif analisis dimaksudkan sebagai metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan”. Sedangkan menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.

Menurut Sukidin (2011:1) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Guna menunjang metode penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

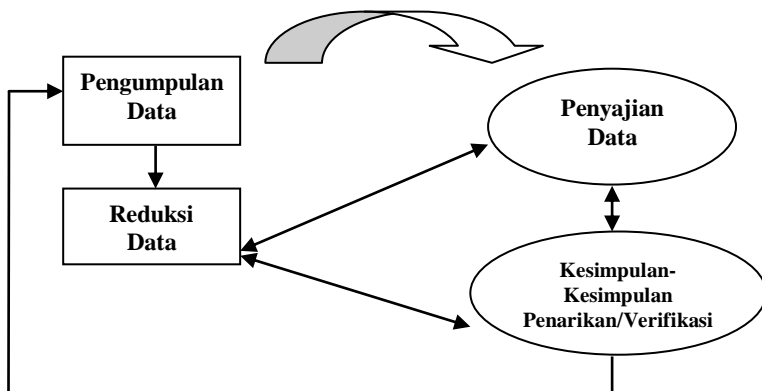
1. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku- buku tentang karakteristik profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
2. Studi Lapangan, yaitu suatu cara untuk mendapat data dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi pembahasan masalah yang diteliti langsung pada objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan. Dalam observasi ini penulis menggunakan teknis partisipatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam observasi ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan tidak terlibat langsung dalam proses pekerjaannya.
 - b. Teknik wawancara.
Teknik wawancara yaitu upaya memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab lisan dengan informan yang telah ditetapkan. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti decara mendalam (*depth Interview*), teknik ini menggunakan pedoman wawancara (*guided interview*) sebagai instrumen. Wawancara mendalam penulis lakukan kepada para informan yang peneliti tunjuk sebagai *key person* dalam penelitian ini.
 - c. **FocusGroupDiscussion**
Focus Group Discussion dilaksanakan dengan melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan berkaitan dengan karakteristik profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung belum berjalan dengan baik, antaralain:
 - 1) Ketua DPRD Kota Bandung
 - 2) Wakil Ketua I dan III DPRD Kota Bandung
 - 3) Sekretaris Dewan

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan menggabungkan data ke dalam pola, tema, kategori, sedangkan penafsiran adalah

memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mencari hubungan antara beberapa konsep. Penafsiran menggambarkan perspektif peneliti bukan kebenaran. Analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bukan merupakan hal yang berjalan bersama, keduanya dilakukan sejak awal penelitian. Analisis data dilakukan agar data yang telah diperoleh akan lebih bermakna. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Miles dan Huberman (2014: 20) menjelaskan analisis data adalah proses mencari secara sistematis dan mengatur catatan wawancara, catatan lapangan, dan *rider* lain yang dihimpun untuk menggiring pengertian. Analisis tersebut melibatkan kerja dengan data, mengaturnya, memisahkannya kedalam unit-unit yang dapat dikelola, memadukannya, mencari-cari pola memenuhi hal-hal penting dan apa yang diketahui dan memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:



Sumber: Miles et al dalam Rohendi (2002:20)

Gambar
Teknik Analisis Data Kualitatif

IV. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1. Pelaksanaan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Peneliti memperoleh gambaran bahwa p anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung secara empirik telah memberikan kontribusi yang bermakna dalam pencapaian tujuan organisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung profesionalisme dilaksanakan secara optimal, maka fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD Kota Bandung meningkat”, Fungsi ideal dari pelaksanaan tugas anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam unit kerja adalah fungsi pelayanan, maka orientasi manajemen harus berfokus pada masyarakat. Maka konteks seharusnya adalah bahwa arah pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, baik internal maupun eksternal.

Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan tugas mulia itu pegawai negeri sebagai aparatur negara yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kedudukan dan tugasnya, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya, anggota dewan di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih terdapat banyak kekurangan baik dari fungsi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yaitu hasil pekerjaan kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat, selain itu masih adanya jiwa kepegawaian sebagai anggota dewan dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan.

Hal-hal di atas tidak mudah, karena barisan terdepan dalam pemberian pelayanan adalah anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dengan berbagai persoalannya. Bukan tidak mungkin masyarakat memperoleh citra yang buruk tentang lembaga/organisasi, gara-gara pekerjaan pelayanan oleh anggota dewan yang jelek. Dari sinilah mungkin *enter-point*-nya harus fokus pada peningkatan kerja anggota dewan. Karena tidak mungkin terjadi “fokus pada masyarakat” tanpa didahului oleh “fokus pada anggota dewan Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pilar utama terwujudnya agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah tersedianya sumber daya dewan yang profesional dalam menjalankan tugas pengabdianya dan memiliki sikap dan moral yang Baik. Profesional memiliki makna yang cukup luas, yaitu memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bekerja secara efektif dan efisien, kreatif, mempunyai etos kerja yang tinggi. Guna mewujudkan anggota dewan yang profesional, tidak hanya diperlukan kemampuan Intelektual (iq) semata, tetapi dibutuhkan manusia yang paripurna. Artinya manusia yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual.

Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Bandung diberikan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. Dengan profesionalisme yang tinggi, anggota dewan akan bekerja lebih giat di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan profesionalisme yang rendah pegawai tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kurang memiliki informasi yang jelas apakah pekerjaan mereka memiliki

dampak positif terhadap para penerima manfaatnya yaitu individu atau kelompok yang dilayani organisasi.

Signifikansi tugas seringkali tidak pasti karena beberapa alasan. Pertama, anggota dewan di organisasi sering menemui prasangka buruk, yang bisa menghalangi mereka untuk merasa bahwa mereka telah mencapai tujuan – tujuan dan membuat mereka ragu apakah misi mereka adalah mungkin. Kedua, para anggota dewan seringkali hanya menerima umpan balik langsung yang sedikit tentang bagaimana tindakan - tindakan mereka mempengaruhi penerima manfaat, yang mungkin membuat mereka ragu apakah misi mereka tercapai atau tidak. Seseorang yang tergolong profesional, yang berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan (pekerjaan) diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, apalagi dibarengi dengan tingkat motivasi tinggi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga masyarakat.

4.1.2. Penguatan Profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung di lihat dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

1. Karakteristik Harus Ahli

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa karakteristik harus ahli cukup memberikan kontribusi bagi anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Keahlian seseorang dalam menjalankan tugasnya, merupakan salah satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam menunjang tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Keahlian ini juga mencerminkan sikap profesional yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, keahlian aparat pengelola, jelas dituntut untuk memiliki keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik dari dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang secara substantif akan tercermin dari penguasaan terhadap pekerjaan, pengetahuan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya serta memahami berbagai permasalahan

yang dihadapi oleh anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada umumnya telah menguasai pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada mereka. Hal ini mencerminkan bahwa secara personal aparat pelaksana telah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan. Penguatan atas hasil temuan tersebut juga tercermin dari hasil tanggapan informanyang pada umumnya menyetujui terhadap pernyataan positif yang diajukan peneliti. Kondisi faktual tersebut, semakin menegaskan bahwa penguasaan terhadap pekerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan di lingkungan dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Dengan demikian, upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan aparat pelaksana terhadap tugas dan pekerjaannya sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya dari Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

2. Karakteristik Mampu Mandiri

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa karakteristik mampu mandiri, secara empirik telah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung karakteristik mampu mandiri secara empirik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Kemandirian seseorang dalam melaksanakan tugasnya, merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pelaksanaan program kerja, kemandirian aparat pelaksana juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kerja. Hasil penelitian menemukan anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada umumnya telah memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga secara substantif dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Penguatan atas

temuan tersebut, dapat dicermati dari hasil wawancara yang pada umumnya tidak menyetujui terhadap pernyataan negatif yang diajukan peneliti. Fakta empiris ini, semakin memperkuat argumentasi bahwa tingkat kemandirian para pelaksana sangat dibutuhkan guna mempermudah tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Secara operasional, tingkat kemandirian anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aparat pelaksana, baik menyangkut kegiatan yang sifatnya administratif, teknis lapangan, maupun kegiatan yang sifatnya manajerial.

Kondisi faktual juga memperlihatkan adanya sebagian kecil anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung i yang dipandang kurang mandiri dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti bahwa mereka cenderung masih memiliki ketergantungan kepada pegawai lain dalam melaksanakan tugasnya baik dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga secara operasional ikut mengganggu terhadap pencapaian tujuan ang hendak dicapai. Dalam konteks yang berbeda ditemukan fakta bahwa anggota dewan pada umumnya memiliki keteguhan dalam mempertahankan sikap dan pendiriannya sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini mengandung arti bahwa sejauh pekerjaan yang dilakukan telah sejalan dengan tanggung jawab dan peraturan yang ditetapkan, maka anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung umumnya telah memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mempertahankan sikap dan pendiriannya, sehingga kredilitas dan eksistensi aparat dalam melaksanakan tugasnya dapat terjaga dengan baik. Kondisi tersebut, dipandang sangat penting dalam membantu tercapainya sasaran program kerja yang telah berjalan selama ini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kredibilitas dan eksistensi aparat dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau pihak lain yang dilayani, sehingga peran dan tugas organisasi akan mampu menjawab semua persoalan yang dibutuhkan masyarakat.

3. Karakteristik Bertanggungjawab Terhadap Pekerjaan

Hasil pengumpulan data di lapangan menggambarkan bahwa karakteristik bertanggungjawab memberikan kontribusi bagi

peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Keberhasilan suatu program atau kegiatan, sesungguhnya tidak terlepas dari tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dipahami, karena aspek pertanggungjawaban akan sangat membantu institusi, baik menyangkut tertib administrasi, kewajiban seorang pegawai, maupun evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah dijalankan.

Sikap bertanggung jawab dari paraanggota dewan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, sangat penting untuk diperhatikan. Dalam konteks pelaksanaan proses kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, tanggung jawab aparat pelaksana terhadap program kerja pegawai pada umumnya telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat. Hal ini mencerminkan bahwa aparat pelaksana program secara umum telah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa tingginya tingkat pertanggungjawaban aparat pelaksana terhadap program kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, tercermin pula dari kesungguhan mereka dalam melaksanakan tugasnya baik tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Kesungguhan tersebut, boleh jadi merupakan manifestasi dari komitmen anggota dewan dalam mensukseskan program kerja yang tengah dijalankan oleh DPRD Kota Bandung. . Tingginya komitmen anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program pembangunan menjadi semakin penting, mengingat tantangan, harapan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Kemampuan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya juga dipandang penting untuk mendorong akselerasi pencapaian tujuan program kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Tingkat kualifikasi seorang anggota dewan akan tercermin dari kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan sangat menentukan bobot kualifikasi yang dimiliki oleh anggota dewan. Ketidakmampuan anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, boleh jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara *job description* yang diberikan organisasi dengan kemampuan

yang dimiliki anggota dewan yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja anggota dewan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, sehingga diharapkan memberikan penguatan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

4. Karakteristik Mampu Menunjukkan Dirinya Sebagai Profesional

Hasil pengumpulan di lapangan memperlihatkan bahwa karakteristik mampu menunjukkan dirinya sebagai profesional telah memberikan kontribusi bagi organisasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Hasil tersebut mengandung makna bahwa karakteristik mampu menunjukkan dirinya sebagai profesional dalam konteks profesionalisme, Profesionalisme seseorang akan tercermin dari sikapnya yang profesional, dalam arti bahwa yang bersangkutan mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang profesional, baik dalam berbicara, berfikir maupun dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam konteks pelaksanaan program kerja, sikap profesional dari anggota dewan jelas sangat dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran terhadap tujuan.

Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa sikap profesional dari anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tercermin dari tingkat disiplin mereka dalam menjalankan tugasnya. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa aparat pelaksana pada umumnya telah menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan program kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap disiplin tersebut ditunjukkan, baik terkait dengan waktu pelaksanaan maupun pembuatan laporan kegiatan kerja. Penguatan atas temuan tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yang pada umumnya tidak menyetujui terhadap pernyataan negatif yang diajukan peneliti. Pada sisi lain, tingkat kemahiran dan kepandaian anggota dewan dalam melaksanakan program kerja dipandang sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa tingkat kemahiran dan kepandaian anggota dewan yang melaksanakan program kerja di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada umumnya cukup baik, dalam arti bahwa mereka umumnya telah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian,

secara empirik peneliti juga mendeteksi adanya sebagian kecil pegawai yang kurang memiliki kemahiran dan kepandaian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Padahal secara kualitatif, tingkat kemahiran dan kepandaian ini sangat inheren (melekat) dengan keahlian seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sudah selayaknya mengupayakan adanya peningkatan kemahiran dan kepandaian para anggota dewan sehingga diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebenarnya telah melakukan berbagai langkah strategis terkait dengan peningkatan kemahiran dan kepandaian para anggota dewan.

5. Karakteristik Memegang Teguh Etika Profesi

Hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara menggambarkan bahwa karakteristik memegang teguh etika profesi telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Hasil tersebut juga mengandung makna bahwa secara empirik karakteristik memegang teguh etika profesi dalam konteks profesionalisme telah memberikan dukungan terhadap peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Sikap profesional seorang anggota dewan juga dapat tercermin dari keteguhan mereka dalam memegang etika profesi. Sikap semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan seorang anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pelaksanaan program kerja, keteguhan seorang anggota dewan dalam menjaga etika profesinya sangat dibutuhkan untuk memperlancar program kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dipahami, karena memegang teguh etika profesi, pada akhirnya dapat memberikan penghargaan kepada mereka dalam menjalankan tugasnya, dari pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keteguhan para anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam menjaga etika profesinya, dapat tercermin sikapnya yang jujur dalam melaksanakan tugasnya. Kejujuran dalam melaksanakan

tugas, sesungguhnya merupakan modal (*capital*) bagi anggota dewan agar program kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kejujuran yang dimaksud, tentu saja tidak hanya menyangkut masalah penggunaan anggaran semata, tetapi juga menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan program kerja, baik terkait dengan pekerjaan administratif maupun teknis.

Secara empirik diakui bahwa untuk mendeteksi tingkat kejujuran seseorang memang tidak mudah, karena kejujuran sangat terkait dengan aspek perilaku dan sikap yang secara fisis sulit untuk dilihat. Dengan perkataan lain, kejujuran merupakan sesuatu yang sangat abstrak, tetapi memberikan dampak yang sangat signifikan apabila sudah bersentuhan dengan berbagai kegiatan publik yang sifatnya masal. Oleh sebab itu, untuk menghadapi dan mengantisipasi tingkat kejujuran tersebut, tidak hanya bisa didekati secara fisis tetapi juga psikologis. Dalam konteks pelaksanaan program kerja, kejujuran aparat pelaksana sangat dibutuhkan guna menjaga konsistensi program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Anggota dewan pada umumnya telah bersikap jujur, dalam arti mereka telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan program kerja yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, dalam konteks profesionalisme, aspek kejujuran para anggota dewan dan pengelola program kerja secara empirik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa secara operasional, para anggota dewan dan pengelola program kerja pada umumnya telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan institusi. Hasil temuan ini diperkuat oleh tanggapan responden yang pada umumnya tidak menyetujui terhadap pernyataan negatif yang diajukan peneliti.

Kondisi faktual ini juga mengandung makna bahwa para anggota dewan secara umum telah memiliki komitmen untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, secara personal para anggota dewan juga pada umumnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan program kerja anggota dewan secara kelembagaan. Dengan perkataan lain, orientasi kepentingan institusi atau organisasi

tampaknya cukup mendominasi proses pelaksanaan program kerja, sehingga dalam perspektif kelembagaan pekerjaan tersebut telah membantu institusi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien didasarkan kepada kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang dicapainya.

6. Karakteristik Memelihara Hubungan Baik dengan Klien

Hasil aktual di lapangan didukung informasi dari berbagai informan memperlihatkan bahwa karakteristik memelihara hubungan baik dengan klien telah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Fakta empiris ini juga menunjukkan bahwa karakteristik memelihara hubungan baik dengan klien dalam konteks profesionalisme telah ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan kerja anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Memelihara hubungan baik dengan pihak lain atau *klien* merupakan salah satu syarat dalam memperlancar tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks pengelolaan program kerja, pemeliharaan hubungan baik dengan berbagai pihak, terutama para anggota dewan jelas sangat dibutuhkan. Pemeliharaan hubungan baik ini, secara empirik dapat membantu dalam memperlancar proses pengelolaan program kerja, baik menyangkut prosedur, pengumpulan data, maupun persyaratan lainnya.

Hasil penelitian menemukan bahwa anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang menangani program kerja, pada umumnya memandang penting adanya sinergitas komunikasi atau interaksi diantara berbagai pihak yang terkait dengan program kerja pegawai, baik secara internal maupun eksternal. Interaksi secara internal yang dimaksud adalah membangun interaksi atau hubungan kerja secara harmonis diantara pihak-pihak yang terlibat dalam program kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Penguatan atas temuan tersebut dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yang pada umumnya tidak menyetujui terhadap pernyataan negatif yang diajukan peneliti. Secara faktual ditemukan, bahwa para p anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada umumnya telah mampu melakukan interaksi atau komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan program kerja anggota dewan, baik secara

internal maupun eksternal sehingga proses pelaksanaan program kerja dapat berjalan lancar. Pada sisi lain ditemukan pula bahwa kerjasama yang bangun dalam konteks pelaksanaan anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, secara umum telah berjalan dengan baik, dalam arti bahwa dalam konteks pelaksanaan program kerja berbagai pihak yang terlibat telah mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penguatan Profesionalisme Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung di lihat dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, maka secara komprehensif peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Dalam kedudukan dalam tugasnya, baik pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, anggota harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya, anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih terdapat banyak kekurangan baik dari fungsi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dimana hasil pekerjaan kurang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat, selain itu masih adanya jiwa sebagai anggota dewan berfikir mengikuti pada kebiasaan kerja dengan mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan. Dalam bekerjanya.
2. Penguatan Profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung di lihat dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terbangun dari enam karakteristik, yaitu harus ahli, mampu mandiri, bertanggungjawab terhadap pekerjaan, mampu menunjukkan bahwa dirinya sebagai profesional, memegang teguh etika

profesinya dan memelihara hubungan baik dengan klien (masyarakat) belum berjalan secara optimal Artinya secara empirik menggambarkan bahwa profesionalisme pegawai walaupun telah dilaksanakan berdasarkan karakteristik profesionalisme anggota dewan dan telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sehingga berimplikasi pada tujuan organisasi. Karakteristik mampu menunjukkan bahwa dirinya sebagai profesional sudah berjalan dengan baik. Sedangkan karakteristik memelihara hubungan baik dengan klien (masyarakat).belum memberikan kontribusi dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti dapat menyampaikan saran-saran penelitian yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi, baik dalam konteks pengembangan ilmu maupun sebagai kontribusi bagi perbaikan konsep profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungi. Adapun saran yang dimaksud antara lain :

5.2.1. Saran Akademik

Disarankan kepada peneliti lain agar dilakukan penelitian lanjutan tentang fenomena belum optimalnya profesionalisme khususnya ditinjau dari perspektif ilmu administrasi publik. Fenomena tersebut diperkuat oleh adanya faktor lain yang tidak diteliti di luar dari profesionalisme pada penelitian ini, namun dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tujuan organisasi. Faktor lain ini dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan dalam konteks locus yang berbeda.

5.2.2. Saran Praktis

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan profesionalisme anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungi. Baik pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungi.sebaiknya karakteristik profesionalisme anggota dewan lebih mendapat perhatian dari pimpinan, agar tujuan

- organisasi yang dilaksanakan anggota dewan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditentukan. Disamping itu agar tujuan benar-benar dapat diwujudkan atau diterjemahkan dalam kegiatan organisasi secara keseluruhan.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungi, sebaiknya dapat melaksanakan penguatan profesionalisme dengan memelihara hubungan baik dengan klien dalam hal ini adalah dengan masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan interaksi yang baik antara anggota dewan dengan masyarakat dan mampu melaksanakan masing-masing tugas anggota dewan dengan penuh tanggungjawab. Hal ini tidak lain agar tujuan organisasi dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi, Suit Yusuf. 2009. Sikap Mental dalam Manajemen SDM. Cetakan 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anoraga. 2009. Psikologi Kerja. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Bandung: Tarsito.
- As'ad, Moh. 2005. Psikologi Industri, Yogyakarta: Liberty.
- Atmosudirdjo. Prajudi. 2005. Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design*, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dale, Ernest, 2003. Management: Theory and Practice, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha Ltd
- Farland, Dalton. E, Mc. 1999. Management. New York: Macmillan Publishing.
- Gibson. 2000. Organisasi dan Manajemen. Dalam Wahid Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

- Handyaningrat, Soewarno. 2007. Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen.. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Handoko. Hani. 2017. Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPEE.
- Harefa, Andrias. 2004. Membangkitkan Etos Profesionalisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Gramedia
- Hasibuan. Malayu. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 2007. Manajemen Personalialia, Jilid 2 Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta
- Henry, Nicholas. 2005. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik. Alih Bahasa Luciana D. Lontoh Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar. 2001. Metode Penelitian Survey Jakarta: Gramedia
- Kast, Freemont. E and Rozenweig. 2002. Organisasi dan Manajemen. Terjemahan Yasin. Jakarta: Bina Aksara.
- Keraf A. Sonny, 1998, Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya), Yogyakarta: Kanisius.
- Kreitner, R. dan Kinicki. 2008. Organizational Behavior. 8th Edition. Boston: McGraw-Hill.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2013. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (jilid 1). Jakarta: Gunung Agung.
- Maister, David. 2017. *True Professionalisme*. New York: The Free Press.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marwansyah dan Mukaram. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Administasi Niaga Politeknik Negeri.
- Mc Farland, Dalton E. 1999. *Management: Foundation and Practices*. New York: MacMillan.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moeljono, Djokosantoso. 2003. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munandar, Haris . 2019. *13 Kinerja Rahasia Kekuatan*. Bandung: Alumni.
- Nigro, Felix A and Nigro, Lloyd, G. 2012. *Modern Public Administration*. California: Harper and Row.
- Nitisemito, Alex. 2015. *Manajemen Personalia (MSDM)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 2014. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Jakarta: IIP.
- Pamungkas, Sri Bintang, 1996. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Daulat Rakyat.
- Pfiffner, John Mc Donald. 2019 *Principles of Public Administration*. California: Ronald Press.
- Presthus, Robert Vance. 2011. *Public Administration*. University of Michigan. Ronald Press, Co.
- Purba Sukarman dkk. 2020. *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri* Cetakan 1

- Ranupandojo dan Suad Husnan, 2007. *Manajemen Personalialia*, Jilid 2 Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kualitas Profesional Pamong Praja Yang Responsif*. Jakarta: IIP.
- Robbins, Stephen. Fayol, Henry. 2010. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3*. Terjemahan Pasolong. Jakarta: Arcan.
- Samsudin, Sadili. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke-Satu. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Sanjaya. 2007. *Metode pembelajaran*. Jakarta : Kencana
- Schemerhorn, John R., Hunt, James G and Osborn, Richard N. 2003. *Managing Organizational Behavior*. New York: John Willey & Son.
- Sedarmayanti. 2017. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian, P. Sondang. 2014. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Silalahi, Amin. 2007, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Batavia Press.
- Simamora. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Simon, Herbert A. 2006. *Administrative Behavior (Perilaku Administrasi)*. Alih Bahasa St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sindoro Alexander, A.F. Stoner, James Dkk. 1996. *Manajemen*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1996.
- Sobandi, Baban. 2002. *Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Mutiara Ilmu.

- Soedjadi, F.X. 2007. Analisis Manajemen Modern Kerangka Berpikir dan Beberapa Aplikasinya. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Steers. Richard. 2004. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Stoner, James A. F. 2012. Manajemen. Prentice-Hall.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bineka Cipta.
- Sukidin. 2011. Administrasi Pelayanan Publik. Jakarta : Gramedia.
- Supriatna, Tjahya. 2001. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwatno, et.al. 2002. Manajemen Modern, Bandung: Zafira.
- Taylor, Frederick Winslow. 2006. The Principles of Management, dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. 1987. Classics of Organization Theory, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
- Terry, George R. 2008. Principles of Management. Alih Bahasa Winardi. Bandung: Penerbit Alumni
- Thoha, Miftah. 2009. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali.
- Tjokroamidjojo. Bintoro, 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Usman, H & Akbar, P.S.. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahid, Djoerban. 2006. Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi Bambang. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Penerbit SULITA, Bandung

- White. Leonard D. 2008. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Winardi, J. 2008. *Manajemen*. Bandung: Rhineka Cipta. Jakarta: Karya Nusantara.
- Wursanto. Abdullah. 2014 *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo
- Yukl, Gary A. 2004. *Leadership in Organizations*. California: Prentice Hall.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/dekat> [Diakses 21 Juni 2016].
- Hadadi, Ahmad. 2013. *Analisis Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Dan Pemberian Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Pascasarjana Unpas.
- Lekatompessy, J.E. 2003. Hubungan Profesionalisme dengan Konsekuensinya: Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja, dan Keinginan Berpindah : Studi Empiris di Lingkungan Akuntan Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 5 (11), hal.69-84.
- Maihendro, S.AP 2020. *Analisis Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan*

Fungsi. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)* Volume 2 No. 4 – 30 April 2020

- Pamungkas, Widyanggoro. Jabar, Abdul. Cipi. 2014. Pengaruh Profesionalitas, Kepuasan Kerja, Iklim Organisasi terhadap Kinerja Guru SMKN di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan: Vol.2 (2): 265-278.*
- Soni Muhammad Mafluh Zain 2022. Analisis Profesionalisme Dan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Sisi Legislasi. *Jurnal ESCAF 1st 2022*
- Sulistiyawati Nanik. 2016. Pengaruh Profesionalisme Pegawai Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Se Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Semarang: Pascasarjana Stie Dharmaputra Semarang
- Evsu Wulan Suri 2018. Profesionalisme Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi; Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu; *Jurnal internasional*,
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/672>